



RENSTRA

2025 - 2026

Dinas Sosial Kabupaten Tegal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN.

- 1.1 Latar Belakang.....1
- 1.2 Landasan Hukum 3
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....5
- 1.4 Sistematika Penulisan.....7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.....9
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial..... 28
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial..... 31
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial 53

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....58
- 3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra..... 63
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 64
- 3.4 Penentuan Isu Isu Strategis..... 65

| | | |
|----------|---|----|
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah..... | 66 |
| 4.2 | Cascading Kinerja mulai dari Tujuan ,Sasaran,Outcome, dan output serta Indikatornya masing masing | 68 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1 | Strategi dan Arah Kebijakan | 69 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | |
| 6.1 | Rencana Program dan Kegiatan | 73 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. | 92 |
| BAB VIII | PENUTUP..... | 93 |

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga tersusunya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tegal 2025 – 2026

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2026 disusun berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru
2. PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Hasil Evaluasi RPJMD, Pendanaan Target Capaian Kinerja Makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah.
6. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020- 2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan

fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo -Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemasang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.

7. Hasil Evaluasi RPJMD , Pendanaan Target Capaian Kinerja Makro dan IKU Daerah dan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas- Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.

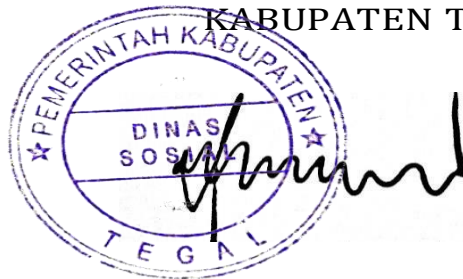
Renstra merupakan Instrumen dalam rangka mengarahkan tujuan Organisasi Dinas yang akan dicapai dan cara pencapaiannya untuk waktu 2 (Dua)) Tahun ke depan. Renstra merupakan awal dari proses Akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Tegal kepada pihak pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya Renstra Kabupaten Tegal dalam 2 (Dua) Tahun kedepan ini, diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan secara bertahap dari Tahun ke Tahun , sehingga apa yang menjadi Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tegal akan terwujud.

Penyusunan Renstra ini tentunya jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon masukan, saran serta umpan balik dari masyarakat maupun pihak yang berkompeten guna perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pejabat struktural serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Slawi, 30 Nopember 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL



IWAN KURNIAWAN . AP.MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197604291995011001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, adalah suatu **proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah**, perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Adapun Keterkaitan antara Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah jika Renstra didasarkan pada RPJMD 2019- 2024 yang berisikan visi dan misi dari Bupati Terpilih sedangkan Rencana Pembangunan daerah (RPD) didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Adapun keterkaitan antara Renstra dengan RPD adalah bahwa Renstra merupakan penjabaran dari Tujuan dan sasaran yang telah di akomodir melalui Program dan Kegiatan , RPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Dinas.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Sosial Kabuapten Tegal berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tegal tahun 2025-2045, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perpres 18 Tahun 2020 Tentang RPJMD Tahun 2020- 2024;
5. Perpres 18 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Propinsi Jawa Tengah (Kawasan Bregas Malang)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 147).
16. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Tegal 2025 -2026 mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang masa depan Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan serta pelayanan yang prima di bidang Sosial.
2. Memberikan acuan kepada Stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam Pembangunan Kabupaten Tegal.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bermuara pada upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah:

1. Pengendalian dan Evaluasi Substansi.

Pengendalian dan Evaluasi Substansi bertujuan untuk mengetahui apakah penjabaran rencana Pembangunan dalam Renstra OPD sudah berpedoman pada RPJPD.

Pengendalian dan Evaluasi tersebut berpijak pada:

- a. Profesionalisme Pelayanan menuju kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.*

Pembangunan jangka menengah melalui Profesionalisme Pelayanan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik yang didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai

dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan, peningkatan kemampuan dan kemandirian dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodir tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional maupun Internasional. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung oleh Stakeholder untuk meningkatkan kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan Taktis Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang berfokus pada isu-isu bidang sosial. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam rentang periode 5 (lima) tahun yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal serta sebagai dasar penilaian Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

2. Sebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial.
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Sosial.
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial
 - 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota
 - 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

| | | | |
|---------------------|-----|---|--|
| BAB | IV | TUJUAN DAN SASARAN | |
| | | 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial. | |
| BAB | V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| BAB | VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN | |
| BAB | VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | |
| BAB | VII | PENUTUP | |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | | | |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor Nomor 82 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas Sosial Kabupaten Tegal merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Kebencanaan , Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dan Penanganan warga Migran Korban Kekerasan.

Adapun penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tatakerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Uptd, 1Kelompok Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

1. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI:

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial,

Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan Kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan ;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi social, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang perlindungan,

jaminan sosial dan kebencanaan;

2. NAMA JABATAN :SEKRETARIS

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kelompok unsur Dinas;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas;
- f. penyiapan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- i. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas.

3. KELOMPOK UNSUR PERENCANAAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan Renja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi program Dinas;
- c. penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial, bidang perlindungan, jaminan sosial dan kebencanaan;
- d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas;
- e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan Renja Dinas;
- f. penyiapan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas;
- g. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi;
- h. pelaksanaan kegiatan perencanaan sosial; dan
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Perencanaan Dan Evaluasi Program.

4. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan Renja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknisketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;
- f. pengelolaan kearsipan Dinas;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol; dan
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

5. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan Renja;
- b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dinas;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas; dan
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;

- e. pelaksanaanevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Rehabilitasi Sosial;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Rehabilitasi Sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dibidang Rehabilitasi Sosial.

9. KELOMPOK UNSUR REHABILITASI SOSIAL DASAR

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Dasar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Dasar.

10. KELOMPOK UNSUR REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial

bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Korban Tindak Kekerasan, Eks Warga Binaan, Kelompok Minoritas dan Keluarga Bermasalah Psikologis.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelompok Unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

11. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEPAHLAWANAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Kepahlawanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, Pengumpulan uang dan sumbangan serta Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan.
- h. mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- i. menyelia pelaksanaan tugas Bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan

efisien dan efektif;

- l. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan LKj, LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- n. memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

12. KELOMPOK UNSUR PENGEMBANGAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTARAAN SOSIAL

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan pelayanan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan

kegiatan di Kelompok Unsur Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

- a. melaksanakan penyiapan data sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lainnya
- b. dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun konsep SOP kegiatan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan

realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;

- g. menyetujui penyusunan bahan penyusunan LKj, LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- i. memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab;

13. KELOMPOK UNSUR PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dalam melaksanakan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kelompok Unsur Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

14. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG

PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL
DAN KEBENCANAAN

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan

- Kebencanaan;
- e. pelaksanaanevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
 - f. pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

15. KELOMPOK UNSUR PENGELOLAAN DATA DAN ANAK TERLANTAR

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Terlantar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan sosial dan Kebencanaan; dalam melaksanakan pelayanan perlindungan, jaminan social, pelayanan penjangkauan, rujukan serta pemantauan anak terlantar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Terlantar mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Anak Terlantar.

16. KELOMPOK UNSUR PENANGANAN BENCANA

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kelompok Unsur Penanganan Bencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam pelayanan perlindungan sosial bagi korban bencana, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Unsur Penanganan Bencana mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Kelompok Unsur Penanganan Bencana.

- a. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- b. menyelia penyiapan bahan penyusunan LKJ, LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- c. mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- e. memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggungjawab;

17. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LOKA BINA KARYA KELAS A

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melakukan pengelolaan Loka Bina Karya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

kebijakan di bidang pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;

- d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A;
- f. pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Loka Bina Karya Kelas A; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang pengelolaan dan pelayanan unit pelaksana teknis daerah Loka Bina Karya Kelas A.

18. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

A. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melakukan penyiapan bahan penyusunan Renja, dan ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan Renja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan

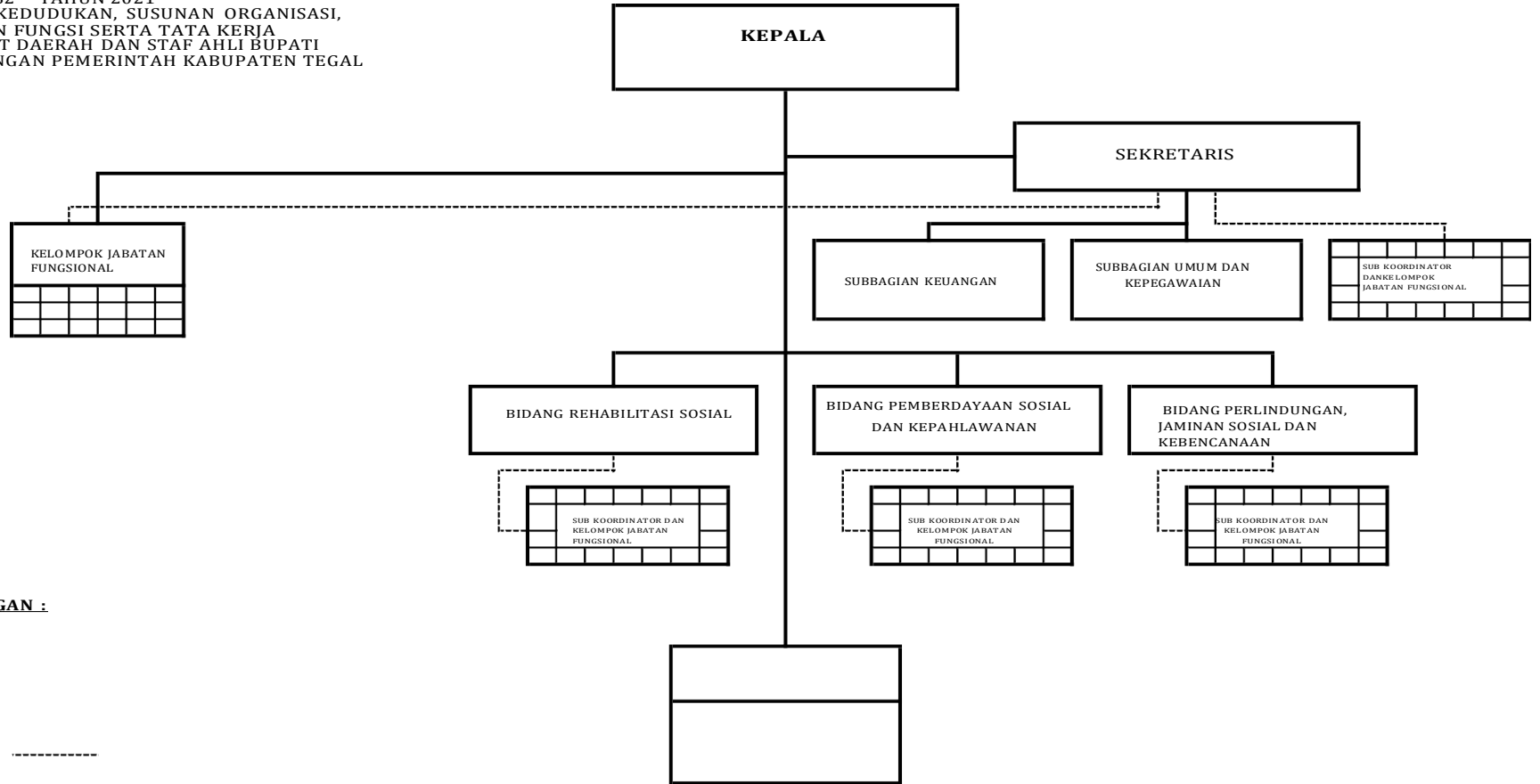
- ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian tatausaha Unit Pelaksana Teknis Daerah.

19. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu dan dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja.

LAMPIRAN IX.A
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 82 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL



KETERANGAN :

—————

2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

| NO | URAIAN | JUMLAH TAHUN 2023 | |
|----------------|--|----------------------|-------|
| 1 | Jumlah Pegawai | | |
| | a. PNS / CPNS | 28 | Orang |
| 2 | Kualifikasi Pendidikan | | |
| | a. Pasca Sarjana (S2) | 4 | Orang |
| | b. Sarjana (S1 / D IV) | 17 | Orang |
| | c. Ahli Madya (DIII) | - | Orang |
| | d. SMA | 6 | Orang |
| | e. SMP | - | Orang |
| f. SD | 1 | Orang | |
| 3 | Pangkat dan Golongan | | |
| | a. Golongan IV | 3 | Orang |
| | b. Golongan III | 21 | Orang |
| | c. Golongan II | 3 | Orang |
| d. Golongasn I | 1 | Orang | |
| 4 | Jumlah Pejabat Struktural & FunhgSIONAL | | |
| | a. Struktural | 8 | Orang |
| b. Fungsional | 10 | Orang | |

Dalam rangka mendukung kinerja Dinas Sosial terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) LBK dan Rumah Singgah "TRENNGGINAS" yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ PPKS, terdiri dari:

| NO | (UPTD) | UNIT | SASARAN |
|----|----------------------------|--|--|
| 1 | Loka Bina Karya (LBK) | Unit Pelayanan Sosial Disabilitas | Disabilitas |
| 2. | Rumah Singgah "TRENGGINAS" | Tempat penampungan sementara sebelum PMKS di rujuk ke Balai Rehabilitasi Sosial. | Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar dan Tuna Sosial (PGOT) |

2.2.1. Sumber Daya Non Aparatur Berbasis Masyarakat

Dinas Sosial juga memiliki SDM dengan status non aparatur atau pendamping sosial berbasis masyarakat atau relawan yang tersebar di berbagai daerah dengan lokus wilayah: kecamatan dan desa/kelurahan. Keberadaan SDM non aparatur tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. SDM non aparatur merupakan para relawan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan pendamping sosial lainnya serta penyelenggara pelayanan sosial pada lembaga kesejahteraan sosial, lihat Tabel 2.2.1 berikut ini :

Tabel 2.2.1
SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL
BERBASIS MASYARAKAT

| No | Jenis SDM Berbasis Masyarakat | Kedudukan | Regulasi |
|----|--|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Pendamping PKH | Kabupaten | UU No.11/2009 |
| 2 | Tenaga Kesejahteraan Sosial/TKSK | Kecamatan | Permensos NO.3/2013 |
| 3 | Satuan Bakti Kesejahteraan Sosial/Sakti Peksos | Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten | Permenos 15 A/2010 |
| 4 | Pendamping Sosial KUBe | Kelompok KUBe | UU No.13/2011 |
| 5 | Pekerja Sosial Masyarakat/PSM | Desa/Kelurahan | Kepemensos No. 28/1987 |
| 6 | Pendamping KTK-PM | Desa/Kelurahan | Permensos No. 83/2005 |
| 7 | Taruna Siaga Bencana/Tagana | Kabupaten dan Kecamatan | Permensos No. 29/2012 |
| 8 | Pelopor Perdamaian | Kelompok/Desa/ Kelurahan | Permensos No. 08/2012 |

Sumber: Bidang Pemberdayaan Sosial 2023

2.2.2. Kondisi-kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis s a r a n a d a n prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kab. Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut :

| No | Sarpras | Jumlah / Kapasitas | Satuan |
|----|---------------------------|--------------------|----------|
| 1 | Komputer | 39 | Unit |
| 2 | Monitor | 39 | Unit |
| 3 | Printer | 26 | Unit |
| 4 | Notebook / Laptop | 48 | Unit |
| 5 | LCD Proyektor | 4 | Unit |
| 6 | Mesin Tulis / Mesin Ketik | 1 | Unit |
| 7 | AC Sentral | - | Unit |
| 8 | AC Split | 14 | Unit |
| 9 | AC Casette | - | Unit |
| 10 | Televisi | 1 | Unit |
| 11 | Telepon standar | 1 | Unit |
| 12 | Telepon/PABX | - | Unit |
| 13 | Sound System | 2 | Unit |
| 14 | Filling Cabinet | 7 | Unit |
| 15 | LAN (Local Net Working) | - | Jaringan |
| 16 | Kendaraan Roda 4 | 4 | Unit |
| 17 | Kendaraan Roda 2 | 90 | Unit |
| 18 | Ruang Aula | 1 | Ruang |
| 19 | Rumah Singgah | 1 | Gedung |
| 20 | SLRT | 1 | Gedung |

Sumber: Sub.Bag.Umum Kepegawaian 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Dinas Sosial terfokus pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Tat Wam Asih” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidakmampuan (*powerlessness*) menjadi memiliki kemampuan (*powerfull*). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD RI Tahun 1945 yang diperkuat dengan UU Kesejahteraan Sosial, UU Penanganan Fakir Miskin, dan UU Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan PP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah serta PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara. Dengan kata lain, Dinas Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), untuk menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi.

Esensi dari kata sejahtera memberikan indikasi bahwa:

- a. Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- b. Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya, dan

- c. Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara, serta
- d. Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat “kewajiban negara” (*state obligation*) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang berkeadilan (*justice for all*). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.

- d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (*Human Development Index*). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang – undang nomor 11 tahun 2009 yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah menjadi beberapa Program sebagaimana berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Penanganan Bencana
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

2.3.1. Kondisi Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Kondisi Layanan Rehabilitasi Sosial selama 3 Tahun terakhir dapat tergambar dalam Tabel 2.3.1 berikut :

Tabel 2.3.1. Capaian Penanganan Rehabilitasi Sosial

| NO. | PENANGANAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | TAHUN 2022 | |
|-------------------|--|------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| | | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI | TARGET | REALISASI |
| 1 | REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI | 247 | 247 | 100 | 30 | 8.009 | 8.009 |
| 2 | REHABILITASI SOSIAL DASAR LANSIA TERLANTAR DI LUAR PANTI | 56 | 56 | 80 | 18 | 4.672 | 4.672 |
| 3 | REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI | 59 | 59 | 80 | 763 | 675 | 675 |
| 4 | REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI LUAR PANTI | 15 | 15 | 30 | 304 | 9 | 9 |
| 5 | PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA | 506 | 506 | 40 | 402 | 446 | 446 |
| JUMLAH | | 883 | 883 | 330 | 1.517 | 13.811 | 13.811 |
| PROSENTASE | | | 100 | | 450 | | 100 |

Sumber : Data SPM Dinsos Kab.Tegal

Dari Tabel Layanan Standar Pelayanan Minimal tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa jumlah penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selama Tiga Tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan , hal ini dikarenakan adanya Lonjakan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang melonjak akibat adanya Pandemi Covid 19.
2. Adanya Layanan Data yang sudah terintegrasi mulai Tingkat Desa sampai dengan Tingkat Kabupaten.
3. Anggaran penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tidak hanya bersumber dari APBD II saja melainkan dari APBD I, Pemerintah Pusat dan Pihak Lain (Bantuan Lembaga social, CSR , Masyarakat dan lain lain)

Layanan Rehabilitasi Sosial yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka mensejahterakan Masyarakat diantaranya :

1. Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat miskin, Difabel dan kelompok rentan dalam bentuk barang maupun uang (Jadup Lansia ,Layanan SPM).
2. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan kepada Penyandang Disabilitas maupun kepada anak anak terlantar (Pelatihan Menjahit, Pelatihan Bahasa Isyarat , Pelatihan Potong Rambut dll)
3. Fasilitasi Penanganan Rehabilitasi baik untuk Anak Terlantar, Lansia Terlantar , Disabilitas Terlantar maupun ODGJ (Layanan Rujukan ke Panti Sosial)

2.3.2.Kondisi Pelayanan Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan Sosial harus dimaknai secara arif, dimana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial telah melekat dan terinternalisasi kedalam struktur organisasi Kementerian Sosial, bahkan menjadi salah satu pilar intervensi Kesejahteraan sosial yang mampu menggerakkan fungsi sosial manusia selaku individu, keluarga atau komunitas , berikut Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dibawah Dinas Sosial :

Tabel 2.3.2. Data PSKS Kabupaten Tegal

| NO. | URAIAN | TERDAFTAR | AKTIF |
|------------|---|------------------|--------------|
| 1. | Karang Taruna | 287 | 150 |
| 2. | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 30 | 287 |
| 3. | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 37 | 37 |
| 4. | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 18 | 18 |
| 5. | Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) | 542 | 40 |
| 6. | Taruna Siaga Bencana (Tagana) | 25 | 25 |
| 7. | Pendamping Sosial (PKH + Sakti Peksos) | 225 | 225 |
| | JUMLAH | 1.164 | 782 |

Program Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, melaksanakan kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan Potensi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

6. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
7. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.3.3. Kondisi Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bantuan dan jaminan sosial merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari resiko-resiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok beresiko dan rentan tersebut diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, karena kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk katagiori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

PPKS yang dikatagorikan sebagai fakir miskin, termasuk katagori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu terdapat sejumlah warga yang dikatagorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient proverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam dan bencana sosial, Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah fakir miskin di Kabupaten Tegal, antara lain keadaan ekonomi nasional belum stabil.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Kabupaten Tegal pada selama 2 Tahun terakhir telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,70 % di Tahun 2022 dari 8,60 menjadi 7,90 dan 0,60 % di Tahun 2023 dari 7,90 menjadi 7,30 .sebagaimana Tabel berikut :

| TAHUN | ANGKA KEMISKINAN | JUMLAH ORANG MISKIN | NAIK/ TURUN |
|-------|------------------|---------------------|-------------|
| 2020 | 8,14 | 117,50 RIBU | |
| 2021 | 8,60 | 123,52 RIBU | + 0,46 % |
| 2022 | 7,90 | 122,63 RIBU | - 0,70 % |
| 2023 | 7,30 | 121,89 RIBU | - 0,60 % |

Sumber : BPS Kabupaten Tegal 2023

Tabel 2. 66 LAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

| NO. | URAIAN | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa) | 1.674.800 | 1.694.240 | 1.713.090 |
| 2. | Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (40% Dari jumlah Penduduk) | 669.920 J | 677.696 | 685.237 |
| 3. | Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (KK) | 217.506 | 220.031 | 222.479 |
| 4. | Rencana Penanganan Perlindungan dan jaminan Sosial | 217.506 | 220.031 | 222.479 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2023

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka layanan perlindungan dan jaminan social adalah dengan memfasilitasi bantuan social dari Pemerintah baik Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) , Penerima Bantuan Iuran (PBI) , Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta bantuan bantuan lain baik yang bersumber dari APBD I , Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) serta bantuan bantuan lain serta melakukan pemberdayaan Masyarakat miskin dengan melalui kegiatan pelatihan ketrampilan guna meningkatkan ekonomi keluarga.

Serta memberikan perlindungan dan Jaminan social kepada Korban Bencana alam maupun bencana social dalam bentuk pemberian bantuan Permakanan, Sandang, tempat pengungsian , layanan Kesehatan dan dukungan psikososial.

Tabel 2. 67 LAYANAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

| NO. | URAIAN | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal (Jiwa) | 1.674.800 | 1.694.240 | 1.713.090 |
| 2. | Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Tegal (40% Dari jumlah Penduduk) KK | 669.920 | 677.696 | 685.237 |
| 3. | Rencana Pendataan Fakir Miskin Tiap Tahun | 669.920 | 677.696 | 685.237 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2023

Layanan Penanganan Fakir Miskin lebih dititikberatkan pada layanan Data PMKS dengan melalui Verifikasi dan Validasi DTKS yang terintegrasi, sehingga memudahkan Masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan social serta mengurangi terjadinya Exclusion Error dan Inclusion Error.

4). Kondisi Pelayanan Penanganan Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertian tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam dan manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Terjadinya bencana tidak dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, maupun berapa besar dampak terhadap masyarakat baik materiil maupun korban jiwa yang berpotensi menimbulkan trauma kepada masyarakat korban bencana sehingga perlu adanya penanganan yang tepat dan cepat. Berdasarkan Data tiga tahun terakhir Mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dapat kita lihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6.2 Data Penanganan Korban Bencana Kabupaten Tegal

| NO. | URAIAN | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|---|-------|-------|-------|
| 1. | Jumlah Korban Bencana yang ditangani | 506 | 764 | 2.804 |
| 2. | Jumlah Korban Bencana yang seharusnya ditangani | 506 | 764 | 2.804 |
| 3. | Cakupan Penanganan Korban Bencana | 100% | 100 % | 100% |
| 4. | Rata rata penanganan Korban Bencana | 1.358 | | |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2023

Tabel 2. 69 Rencana Penanganan Korban Bencana Kabupaten Tegal

| NO. | URAIAN | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah Penduduk Kabupaten Tegal | 1.674.800 | 1.694.240 | 1.713.090 |
| 2. | Jumlah Penduduk Rawan Bencana (4 % dari Jumlah Penduduk) | 66.992 | 67.770 | 67.770 |
| 3. | Rencana Penanganan | 1.358 | 1.358 | 1.358 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2023

Dari Data tersebut diatas menggambarkan bahwa kasus kebencanaan di Kabupaten Tegal terjadi setiap Tahun dengan kecenderungan meningkat jumlahnya, di Tahun 2022 terjadi lonjakan yang sangat tinggi hal ini diakibatkan adanya Bencana Alam (Tanah longsor, Banjir, Puting beliung) serta Bencana Sosial (Kebakaran, Pandemi Covid 19), Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial

dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial penanganan korban Bencana adalah dengan memberikan pemenuhan Kebutuhan Dasar (SPM) yang meliputi kebutuhan permakanaan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Namun Penanganan Kebencanaan di Kabupaten Tegal masih belum optimal Hal ini disebabkan karena :

1. Bantuan yang diberikan kepada korban bencana masih belum memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal.
2. Kapasitas pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana belum maksimal.
3. Koordinasi dalam membangun mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu belum optimal.
4. Sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum representatif.
5. Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.
6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana bagi anak sekolah

Belum seluruhnya daerah rawan bencana di Kabupaten Tegal melaksanakan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.

Adapun upaya yang harus dilakukan adalah :

1. Meningkatkan persediaan barang kebutuhan logistik penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial dan pendamping psikososial korban bencana.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penanggulangan bencana.
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

5. Melakukan pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana.

5). Kondisi Pelayanan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA PERSADA merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA PERSADA juga dijadikan sebagai tempat Ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, serta untuk menanamkan nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (K2KS) sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai Kepahlawanan, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat.

Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi :

- (1) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS

(ziarah wisata, saresehan kewpahlawanan dan napak tilas)

- (2) Bantuan permakanaan dan perbaikan rumah Keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan,
- (3) Bimbingan pelestarian K2KLS kepada masyarakat, Pemuda, Siswa/I SLTA.
- (4) Pemeliharaan TMP.

Namun demikian pengelolaan Taman Makam Pahlawan dirasa belum optimal hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya sarana prasarana Taman Makam Pahlawan
2. Taman Makam Pahlawan belum representatif
3. Kurangnya tenaga pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
4. Belum optimalnya Pemberdayaan Perintis Kemerdekaan/Wakawuri dan Veteran Pejuang

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2020 -2024

| NO. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|-------------|------------|---------------------------------|-------|-------|-------|------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------------------------------|--------|--------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial | | | 74,8 | 85,34 | | | | 88,68 | 86,87 | | | | 118,56 | 101,79 | | | |
| | Persentase Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial | | | 90,08 | 91 | | | | 100 | 91,08 | | | | 111,01 | 100,09 | | | |
| | Persentase Cakupan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | 82,38 | 82,92 | | | | 99,9 | 82,92 | | | | 121,27 | 100,00 | | | |
| | Persentase Layanan Kemiskinan | | | 97,86 | 98,89 | | | | 99,98 | 72,73 | | | | 102,17 | 73,55 | | | |
| 2. | Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase PSKS perseorangan, Keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan. | | | 32,44 | 49,35 | 66,25 | 83,15 | 100 | | | 99,39 | | | | | 150,02 | | |
| | Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti. | | | 29,39 | 45,37 | 62,62 | 81,15 | 100 | | | 95,35 | | | | | 152,27 | | |
| | Persentase PPKS ,Fakir miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. | | | 97,99 | 98,75 | 99,21 | 100 | 100 | | | 96,34 | | | | | 97,11 | | |

| NO. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|---------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Meningkatkan Cakupan Layanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Percentase Cakupan fasilitasi Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan/perdagangan orang | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 0 | | | | | - | | |

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2020- 2024

| Uraian | Anggaran Pada tahun Ke | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan Realisasi | |
|--|------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Angg aran | lisa si |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DINAS SOSIAL | 3.766.463.000 | | | | | 3.443.873.712 | | | | | 91,44 | | | | | | |
| URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR | 3.766.463.000 | | | | | 3.443.873.712 | | | | | 91,44 | | | | | | |
| BIDANG SOSIAL | | | | | | 3.443.873.712 | | | | | | | | | | | |
| Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan | 1245100000 | | | | | 1.181.198.316 | | | | | 94,87 | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Kantor | 250000000 | | | | | 212.308.266 | | | | | 84,92 | | | | | | |
| Pemeliharaan Sarana Kantor | 331.343.000 | | | | | 318.527.450 | | | | | 96,13 | | | | | | |
| Pengadaan Sarana Prasarana Kantor | 367.757.000 | | | | | 366.950.000 | | | | | 99,78 | | | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| Rapat dan Koordinasi | 146.000.000 | | | | | 146.000.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja | 60.000.000 | | | | | 49.702.600 | | | | | 82,84 | | | | | | |
| Penuntasan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah | 90.000.000 | | | | | 87.710.000 | | | | | 97,46 | | | | | | |
| Program Pemberdayaan Sosial | 753.589.000 | | | | | 743.663.150 | | | | | 98,68 | | | | | | |
| Pemberdayaan Sosial Bagi Perorangan Keluarga dan Kelembagaan | 651.395.000 | | | | | 644.234.150 | | | | | 98,90 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| Pengembangan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Pengembangan Sumber Dana Sosial | 102.194.000 | | | | | 99.429.000 | | | | | 97,29 | | | | | | |
| Program Rehabilitasi Sosial | 684.792.000 | | | | | 669.034.346 | | | | | 97,70 | | | | | | |
| Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Usia Lanjut | 223.323.000 | | | | | 222.128.000 | | | | | 99,46 | | | | | | |
| Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial | 230.238.000 | | | | | 218.061.096 | | | | | 94,71 | | | | | | |
| Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Operasional LBK (DBHCHT) | 231.231.000 | | | | | 228.845.250 | | | | | 98,97 | | | | | | |
| Penyediaan Sarpras Difable | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 516.431.000 | | | | | 359.721.750 | | | | | 69,66 | | | | | | |
| Kegiatan Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Kebencanaan | 81.900.000 | | | | | 64.064.500 | | | | | 78,22 | | | | | | |
| Kegiatan Jaminan Sosial Bagi Kelompok Beresiko Sosial | 434.531.000 | | | | | 295.657.250 | | | | | 68,04 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penanganan Fakir Miskin | 566.551.000 | | | | | 490.256.150 | | | | | 86,53 | | | | | | |
| Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Sosial | 464.181.000 | | | | | 455.755.650 | | | | | 98,18 | | | | | | |
| Kegiatan Pelayanan Sosial Bagi Fakir Miskin | 97.771.000 | | | | | 29.901.500 | | | | | 30,58 | | | | | | |
| Kegiatan Sarana Prasarana Sosial (DAK) | 4.599.000 | | | | | 4.599.000 | | | | | 100,00 | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 9.201.644.000 | 18.364.038.500 | 13.975.112.500 | 12.691.198.700 | | 8.715.153.915 | 17.542.697.821 | 8.073.507.310 | | | 94,71 | 95,53 | 57,77 | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | 4.022.487.000 | 3.240.287.200 | 5.108.801.000 | 2.916.183.000 | | 3.785.233.018 | 2.995.787.548 | 2.732.720.275 | | | 94,10 | 92,45 | 53,49 | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 46.743.000 | 32.000.200 | 38.250.000 | 27.047.000 | | 45.895.734 | 31.883.000 | 20.560.000 | | | 98,19 | 99,63 | 53,75 | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 46.743.000 | 32.000.200 | 38.250.000 | 27.047.000 | | 45.895.734 | 31.883.000 | 20.560.000 | | | 98,19 | 99,63 | 53,75 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----|----|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 2.500.516.000 | 2.413.001.000 | 2.100.835.000 | 2.330.078.000 | | 2.325.761.137 | 2.218.995.804 | 1.582.002.257 | | | 93,01 | 91,96 | 75,30 | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 2.410.582.000 | 2.318.001.000 | 2.010.835.000 | 2.211.978.000 | | 2.236.007.137 | 2.128.245.804 | 1.515.592.257 | | | 92,76 | 91,81 | 75,37 | | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 89.934.000 | 95.000.000 | 90.000.000 | 118.100.000 | | 89.754.000 | 90.750.000 | 66.410.000 | | | 99,80 | 95,53 | 73,79 | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 211.918.000 | 175.460.000 | 153.000.000 | 299.700.000 | | 209.214.100 | 175.361.727 | 48.370.025 | | | 98,72 | 99,94 | 31,61 | | | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 4.661.400 | 5.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | | 4.399.100 | 4.996.900 | 3.365.000 | | | 94,37 | 99,94 | 84,13 | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 50.287.300 | 35.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 | | 49.849.500 | 34.925.000 | 260.000 | | | 99,13 | 99,79 | 0,87 | | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 18.781.500 | 10.000.000 | 5000000 | 4.000.000 | | 18.520.300 | 9.991.600 | 3.695.000 | | | 98,61 | 99,92 | 73,90 | | | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | 58.019.000 | 62.710.000 | 45000000 | 40.000.000 | | 57.579.000 | 62.710.000 | 12052000 | | | 99,24 | 100,00 | 26,78 | | | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | 6.323.800 | 5.000.000 | 4000000 | 4500000 | | 6.063.700 | 5.000.000 | 1054000 | | | 95,89 | 100,00 | 26,35 | | | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | 9.120.000 | 7.500.000 | 20000000 | 193.200.000 | | 8.860.000 | 7.500.000 | 8610000 | | | 97,15 | 100,00 | 43,05 | | | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 64.725.000 | 50.250.000 | 45000000 | 35.000.000 | | 63.942.500 | 50.238.227 | 19334025 | | | 98,79 | 99,98 | 42,96 | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 788.000.000 | 150.000.000 | 2.284.000.000 | 26.900.000 | | 760.446.500 | 149.100.000 | 937.923.000 | | | 96,50 | 99,40 | 41,06 | | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | 511.000.000 | | 650.000.000 | | | 485.400.000 | | 631.330.000 | | | 94,99 | | 97,13 | | | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 77.000.000 | | 234.000.000 | 26.900.000 | | 75.797.000 | | 216.350.000 | | | 98,44 | | 92,46 | | | |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 200.000.000 | | 1.200.000.000 | | | 199.249.500 | | 90.243.000 | | | 99,62 | | 7,52 | | | |
| Pengadaan Sarana /Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya | | | 150.000.000 | 200.000.000 | | | | 149.100.000 | | | | | 99,40 | 0,00 | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 120.393.000 | 171.326.000 | 135.716.000 | 172.200.000 | | 93.054.697 | 125.275.267 | 64.781.453 | | | 77,29 | 73,12 | 47,73 | | | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 120.393.000 | 135.610.000 | 100.000.000 | 120.000.000 | | 93.054.697 | 93.559.109 | 47357051 | | | 77,29 | 68,99 | 47,36 | | | |
| Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 35.716.000 | 35.716.000 | 52.200.000 | | | 31.716.158 | 17424402 | | | | 88,80 | 48,79 | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 354.917.000 | 298.500.000 | 397.000.000 | 250.600.000 | | 350.860.850 | 295.171.750 | 79.083.540 | | | 98,86 | 98,89 | 19,92 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---|---------------|----------------|---------------|----|----|-------|--------|-------|----|----|----|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | 153.069.500 | 181.000.000 | 100.000.000 | 131.500.000 | | 152.461.850 | 177.671.750 | 49267440 | | | 99,60 | 98,16 | 49,27 | | | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | 8.995.000 | 7.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | | 8.695.000 | 7.500.000 | 4071100 | | | 96,66 | 100,00 | 58,16 | | | |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 192.852.500 | 110.000.000 | 290.000.000 | 111.600.000 | | 189704000 | 110.000.000 | 25745000 | | | 98,37 | 100,00 | 8,88 | | | |
| Penataan Organisasi | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | 40.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL | | 5.179.157.000 | 15.123.751.300 | 8.866.311.500 | 9.544.673.700 | | 4.929.920.897 | 14.546.910.273 | 5.340.787.035 | | | 95,19 | 96,19 | 60,24 | | | |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | 488.335.000 | 783.000.000 | 1.025.500.000 | 1.059.757.800 | | 469.916 | 778.262.000 | 633.456.000 | | | 99,00 | 99,39 | 61,77 | | | |
| Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | | - | 9.999.500 | - | | | | 100,00 | 0,00 | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 8.000.000 | | | 9.999.500 | 0 | | | | 100,00 | 0,00 | | | |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | 488.335.000 | 773.000.000 | 1.015.500.000 | 1.051.757.800 | | 483.469.916 | 768.262.500 | 633.456.000 | | | 99,00 | 99,39 | 62,38 | | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | 488.335.000 | | | 13.000.000 | | 483.469.916 | 196.186.000 | 23626500 | | | 99,00 | | | | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 200.000.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. | | | 505.000.000 | 390.000.000 | 380.957.800 | | | 505.000.000 | 365000000 | | | | 100,00 | 93,59 | | | |
| Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota. | | | 68.000.000 | 90.000.000 | 131.000.000 | | | 67.076.500 | 35510000 | | | | 98,64 | 39,46 | | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Daerah Kabupaten/Kota. | | | | 75.000.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 415.500.000 | 520.800.000 | | | | 201636000 | | | | | 48,53 | | | |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota. | | | | 45.000.000 | 6000000 | | | | 7683500 | | | | | 17,07 | | | |
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | 2.976.302.000 | 4.914.159.800 | 2.482.655.000 | 3.153.076.000 | | 2.806.089.481 | 4.685.653.723 | 1.490.354.715 | | | 94,28 | 95,35 | 60,03 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----|----|--------------|--------------|--------------|----|----|----|
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 2.151.460.000 | 4.720.706.550 | 1.996.695.000 | 2.904.162.000 | | 2.057.990.923 | 4.494.326.318 | 1.292.410.500 | | | 95,66 | 95,20 | 64,73 | | | |
| Penyediaan Permakanaan | | 1.748.000.000 | 4.346.900.000 | 1.912.000.000 | 1.959.099.000 | | 2.057.990.923 | 4.143.483.639 | 1254277000 | | | 117,73 | 95,32 | 65,60 | | | |
| Penyediaan Sandang | | | 40.425.000 | 17.500.000 | 19.209.000 | | | 40.374.200 | 15410000 | | | | 99,87 | 88,06 | | | |
| Penyediaan Alat bantu | | | 161.875.000 | 27.195.000 | 895.490.000 | | | 139.661.300 | | | | | 86,28 | 0,00 | | | |
| Penyediaan Layanan Data dan Pengaduan | | | 150.000.000 | | | | | 150.000.000 | | | | | 100,00 | | | | |
| Pemberian Layanan Rujukan | | | 21.506.550 | 40.000.000 | 30.364.000 | | | 20.807.179 | 22723500 | | | | 96,75 | 56,81 | | | |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | 403.460.000 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | 824.842.000 | 193.453.250 | 485.960.000 | 248.914.000 | | 462.908.558 | 191.327.405 | 197.944.215 | | | 56,12 | 98,90 | 40,73 | | | |
| Penyediaan Permakanaan | | | | 19.000.000 | | | | | 11.274.000 | | | | | 59,34 | | | |
| Penyediaan Alat bantu | | 330.795.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyediaan Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemberian Layanan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | | 494.047.000 | 18.595.000 | 266.000.000 | 24.000.000 | | 462.908.558 | 17.223.550 | 57.944.215 | | | 93,70 | 92,62 | 21,78 | | | |
| Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | 174.858.250 | 200.960.000 | 224.914.000 | | | 174103855 | 128.726.000 | | | | 99,57 | 64,06 | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | 1.267.800.000 | 9.124.591.500 | 5.160.216.500 | 4.904.102.400 | | 1.203.184.000 | 8.790.957.500 | 3.129.557.500 | | | 94,90 | 96,34 | 60,65 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | 47.180.000 | 20.000.000 | 35.000.000 | 15.735.000 | | 42.140.000 | 18.938.000 | 6.578.400 | | | 89,32 | 94,69 | 18,80 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----|----|--------------|---------------|--------------|----|----|----|
| Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | 47.180.000 | | | | | 42.140.000 | 18.938.000 | 6578400 | | | 89,32 | | | | | |
| Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | | | 20.000.000 | 35.000.000 | 15.735.000 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | 1.220.620.000 | 9.104.591.500 | 5.125.216.500 | 4.888.367.400 | | 1.161.044.000 | 8.772.019.500 | 3.122.979.100 | | | 95,12 | 96,35 | 60,93 | | | |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | 947.699.000 | 667.840.000 | 100000000 | 70.575.000 | | 908.486.200 | 616.741.000 | 56.275.000 | | | 95,86 | 92,35 | 56,28 | | | |
| | | | | | | | | 102.347.000 | | | | | | | | | |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | 253.921.000 | 106.700.000 | 80000000 | 54.497.500 | | 234.597.800 | 8.052.931.500 | 50.916.600 | | | 92,39 | 7547,26 | 63,65 | | | |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (DBHCHT) | | 19.000.000 | 8.330.051.500 | 3.245.716.500 | 4.113.294.900 | | 17.960.000 | | 3.003.925.000 | | | 94,53 | 0,00 | 92,55 | | | |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | 1.699.500.000 | 650.000.000 | | | | 11.862.500 | | | | | 0,70 | | | |
| PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | 344.913.000 | 222.000.000 | 123.500.000 | 154.137.500 | | 337.098.400 | 212.116.650 | 61.160.500 | | | 97,73 | 95,55 | 49,52 | | | |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | 166.956.000 | 153.500.000 | 83.500.000 | 86.725.000 | | 163.792.500 | 147.714.900 | 42.192.500 | | | 98,11 | 96,23 | 50,53 | | | |
| Penyediaan Makanan | | 88.911.000 | 90.000.000 | 70.000.000 | 77.825.000 | | 87.016.000 | 87.235.000 | 42192500 | | | 97,87 | 96,93 | 60,28 | | | |
| Penyediaan Tempat Penampungan pengungsi | | | 48.500.000 | | | | | 45.479.950 | | | | | 93,77 | | | | |
| Pelayanan Dukungan Psikososial | | 78.045.000 | 15.000.000 | 13.500.000 | 8.900.000 | | 76.776.500 | 14.999.950 | | | | 98,37 | 100,00 | 0,00 | | | |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | | 177.957.000 | 68.500.000 | 40.000.000 | 67.412.500 | | 173.305.900 | 64.401.750 | 18.968.000 | | | 97,39 | 94,02 | 47,42 | | | |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | 142.957.000 | 25.000.000 | 20000000 | 44.125.000 | | 138.745.900 | 24.999.850 | 17008000 | | | 97,05 | 100,00 | 85,04 | | | |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | 35.000.000 | 43.500.000 | 20000000 | 23.287.500 | | 34.560.000 | 39.401.900 | 1960000 | | | 98,74 | 90,58 | 9,80 | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | 101.807.000 | 80.000.000 | 74.440.000 | 273.600.000 | | 100.079.100 | 79.920.400 | 26.258.320 | | | 98,30 | 99,90 | 35,27 | | | |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | 101.807.000 | 80.000.000 | 74.440.000 | 273.600.000 | | 100.079.100 | 79.920.400 | 26.258.320 | | | 98,30 | 99,90 | 35,27 | | | |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | 101.807.000 | 80.000.000 | 74.440.000 | 273.600.000 | | 100.079.100 | 79.920.400 | 26258320 | | | 98,30 | 99,90 | 35,27 | | | |

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten

2.4.1.Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Tegal yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Masih banyaknya Masyarakat miskin yang belum tersentuh oleh bantuan social hal ini disebabkan karena adanya inclusion error dan exclusion error, Dimana Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak dapat bantuan dan sebaliknya Masyarakat yang tidak membutuhkan bantuan malah mendapatkan bantuan.
2. Masih terbatasnya jumlah panti Rehabilitasi Sosial sehingga layanan Rehabilitasi PPKS .
3. Kabupaten Tegal belum memiliki Panti Rehabilitasi bagi PPKS
4. Masih banyaknya Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) yang belum tetangani karena keterbatasan Anggaran.
5. Masih minimnya Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung Layanan Kesejahteraan Sosial.
6. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
7. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
8. Koordinasi dan kemitraan strategis antara SKPD dengan Pemerintah Kabupaten untuk mendorong percepatan

penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten maupun *Stakeholders* belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PPKS melalui *Coorporate Sosial Responbility (CSR)* bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

2.4.2. Peluang

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instusi sosial secara berjanjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
3. Revitalisasi panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa dan spirit baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sistem kelembagaan.
4. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan *Roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.

6. Kerjasama *stakeholders* baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangkamelakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PPKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor – faktor yang termasuk dalam kategori Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan tehnik peta kekuatan (Analisis SWOT) identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Lingkungan Internal meliputi :
 1. Kekuatan (Strenght)
 - Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Tegal.
 - Sumber daya alam yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
 2. Kelemahan (Weakness)
 - Belum meningkatnya profesionalisme aparatur dan masih rendahnya produktivitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 - Penyebaran penduduk dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata.
- Lingkungan eksternal meliputi :
 1. Peluang (opportunities)

- Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas-Dinas daerah dan satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Tegal.
 - Nuansa terciptanya Kesejahteraan memotifasi seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Ancaman (Threats)
- Masih banyaknya Masyarakat miskin yang belum mendapatkan layanan sosial
 - Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan.

Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginterasi faktor – faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah :
 - Optimalkan tekad dan semangat untuk melaksanakan pembangunan sesuai bidangnya.
 - Optimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. (ST) adalah
 - Optimalkan tekad dan semangat kabupaten baru untuk membuka dan menciptakan peluang kerja.
 - Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan kerja baru

3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah :
 - Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pekerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
 - Adakan pemerataan pembangunan infra struktur untuk membuka isolasi sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
 - Tingkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah dan pekerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru.
 - Lakukan pembangunan infra Struktur dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6 s/d 109°21'30 Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15 15'30" Lintang Selatan dengan luas wilayah 878,79 Km² dan terdiri dari 18 Kecamatan dan 287 Desa.

Dengan jumlah Penduduk sampai dengan pertengahan Tahun 2023 sebanyak 1.437.542 jiwa, dengan jumlah Masyarakat miskin sebanyak 113.565 jiwa atau sebesar 7,9 % dari Total seluruh jumlah penduduk Kabupaten Tegal.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah masih tingginya angka kemiskinan di kabupaten Tegal yang belum tertangani, disamping itu ada tuntutan masyarakat agar penanganan kemiskinan dilaksanakan dengan cepat, tepat, akuntabel dan transparan.

Sasaran Utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah masyarakat miskin yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat mengfungsikan dirinya dan mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya.

Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terinventarisir di Kabupaten Tegal terdapat 5 (Lima) kelompok sasaran prioritas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu:

- a. Kemiskinan
- b. Keterlantaran
- c. Kecacatan
- e. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

f. Korban Bencana

Dalam implementasinya program pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, antara satu program bidang dengan bidang lain saling melengkapi dan berlanjut begitu juga dengan fungsi dan peran OPD lainnya sehingga penanganan masalah sosial di daerah berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pemberian Informasi Layanan Sosial kepada Masyarakat belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan (Man) 2. Tidak tersedia dukungan anggaran dalam penyebarluasan informasi (Material) 3. Teknik penyebarluasan informasi layanan sosial belum maksimal(Method) 4. Dukungan sumber daya peralatan belum optimal (Machine) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pegawai tidak sesuai ABK 2. Tidak terdapat anggaran khusus dalam sub kegiatan penyebarluasan informasi layanan sosial 3. Penyebarluasan informasi masih manual dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat 4. Sumber daya peralatan dalam penjangkauan informasi layanan masyarakat masih kurang |
| | Pemberian Layanan terhadap Pemberdayaan Sosial untuk PSKS belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang aktifnya peran PSKS Khususnya Karang Taruna dalam menangani masalah sosial maupun pemberdayaan sosial | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari 287 anggota Karang Taruna di Kabupaten Tegal, anggota yang aktif dan memiliki SK dari Desa sebanyak 150 orang anggota Karang Taruna, selain itu kegiatan Karang Taruna Masih bersifat insidental sehingga sasaran pemberdayaan sosial masih belum bisa merata |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Keterbatasan anggaran untuk pemberdayaan PSKS | <ol style="list-style-type: none"> 2. Terdapat 302 PSKS yang ada di kabupaten tegal namun anggaran yang diberikan hanya mampu untuk memberdayakan dan memberikan pelayanan terhadap 168 PSKS |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Manajemen organisasi LKSA belum mengacu pada SNPA dan Human Services Organization (HSO) | <ol style="list-style-type: none"> 3. Belum adanya pelatihan khusus bagi SDM LKSA yang menyangkut HSO dan SNPA |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| | | 4. Masih banyak penyelenggaraan PUB yang belum berizin dari Dinas Sosial | 4. Sosialisasi PUB masih belum merata dan memerlukan kerjasama dengan Dinas Lain untuk penertiban PUB yang belum berizin |
| | | 5. Peran PSKS dalam memberikan pelayanan terhadap PPKS masih belum optimal | 5. Peran PSKS selama ini sebatas tindak lanjut aduan dari masyarakat dan masih belum ada monev pasca menerima bantuan |
| | | 6. Kondisi Taman Makam Pahlawan masih perlu adanya perbaikan dari segi pembangunan | 6. Keterbatasan anggaran untuk perbaikan bangunan di Taman Makam Pahlawan (TMP) |
| 2 | Pemberian Layanan Rehabilitasi Sosial belum optimal | <p>1. Kurangnya SDM bidang rehabilitasi sosial dalam memberikan pelayanan (Man)</p> <p>2. Tidak tersedia dukungan anggaran dalam penanganan ODGJ dan penyediaan alat bantu disabilitas dan dukungan layanan belajar Cerebral Palsy (Material)</p> <p>3. Teknik pemberian layanan sudah multi instansi(Method)</p> <p>4. Dukungan sumber daya peralatan belum optimal (Machine)</p> | <p>1. SDM yang tersedia saat ini hanya 6 pegawai tetap dan 5 THL dengan jumlah sasaran +- 6000 PMKS</p> <p>2.a Anggaran yang tersedia dalam pemberian layanan rujukan hanya cukup untuk +- 50 PMKS, sedangkan permintaan rujukan 100+ PMKS</p> <p>2.b Anggaran yang tersedia dalam pemberian layanan alat bantu hanya cukup untuk 5 pasang alat bantu pertahun, demand 300+</p> <p>2.c Anggaran yang tersedua dalam pemberian layanan belajar CP hanya untuk pengajar 2 orang</p> <p>4. Belum tersedia kendaraan yang memadai dalam pemberian rujukan PMKS</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|---|
| 3 | Masih Terjadi Eclusion Error dalam Data Kemiskinan yang mengakibatkan banyak penerima bantuan sosial salah sasaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator DTKS Desa belum memahami tata kelola DTKS (Man) 2. Alokasi pengelolaan data kemiskinan di Desa belum mandiri (Material) 3. Pemerintah Desa dan masyarakat belum memahami pentingnya validasi data penerima bantuan sosial (Method) 4. Masih terdapat wilayah dengan akses jaringan buruk (Machine) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator DTKS Desa tidak melakukan verval data secara berkala dan sering terjadi pergantian personil operator DTKS 2. Alokasi Dana Desa untuk urusan sosial belum sesuai regulasi 3. Masih terdapat pemerintah desa yang enggan cut off penerima bantuan yang sudah sejahtera 4. Masih terdapat wilayah yang mengalami blank signal |
| 4 | Penanganan program kemiskinan belum optimal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PSKS yang memberikan pelayanan sosial masih timpang dengan jumlah masyarakat miskin (Man) 2. Jumlah anggaran pemberian bantuan tidak sebanding dengan jumlah masyakat miskin (Material) 3. Teknik pemberian bantuan sosial masih dalam tahap mulai pengembangan pemberdayaan 4. | <ol style="list-style-type: none"> 1. PSKS yang tersedia di Desa masih sedikit dalam program pengentasan kemiskinan 2. Anggaran pengentasan kemiskinan saat ini masih teralokasi sebanyak 2% dari total jumlah kemiskinan 3. Saat ini Dinas Sosial masih meramu teknik pemberdayaan yang cocok dalam program pengentasan kemiskinan Kab. Tegal |

3.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025 – 2026 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PPKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Faktor pendorong pelayanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah ketersediaan SDM baik ASN dan non ASN yang berkompeten di bidangnya serta dalam pemberian pelayanan sosial, Dinas Sosial juga melibatkan unsur pilar-pilar sosial yang ditugaskan di 287 Desa seperti TKSK, IPSM, Tagana, Pendamping Sosial PKH, pelibatan unsur pilar-pilar sosial tersebut memiliki fungsi agar penanganan aduan di masyarakat dapat berjalan dengan cepat. Pemberian pelayanan Dinas Sosial juga seiring waktu berjalan meningkat karena Dinas Sosial masuk dalam nominatif instansi penilaian pelayanan publik, penilaian tersebut berpengaruh pada upaya Dinas Sosial agar terus memperbaiki kualitas pemberian pelayanan sosial. Peran Dinas Sosial dalam respon cepat pengaduan masyarakat juga telah diapresiasi oleh Bupati Tegal dari tahun 2022 dan 2023 sebagai admin terbaik dalam pengelolaan aduan masyarakat.

Dalam melaksanakan kesejahteraan sosial ada beberapa factor pendorong keberhasilan dan factor penghambat keberhasilan sebagai berikut :

1. Faktor pendorong pelayanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal

- a. Ketersediaan SDM ASN dan non ASN Dinsos dan pilar-pilar sosial (TKSK, IPSM, Tagana, Pendamping Sosial)
 - b. Keikutsertaan Dinas Sosial dalam penilaian pelayanan publik Kabupaten oleh Ombudsman dan Kemenpan RB
 - c. Peran aktif SDM Dinas Sosial dalam respon cepat penanganan aduan masyarakat
2. Faktor penghambat pelayanan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Tegal
- a. Ketersediaan anggaran / alokasi kebutuhan tidak sebanding dengan jumlah PPKS
 - b. Dukungan sumber daya sarana dan prasarana pemberian layanan sosial belum memenuhi standar
 - c. Kurangnya sinergitas antara Dinas Sosial dengan stakeholder terkait dalam pemberian pelayanan sosial (contoh pemerintah Desa dalam pengelolaan DTKS).
 - d. Sebagian masyarakat belum memahami alur standar pelayanan yang disediakan Dinsos

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tegal.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.

Adapun Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2026 sebagaimana Tabel berikut :

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan urusan Pemerintah Daerah

berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang sosial, sehingga secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tegal.

Untuk Pembangunan bidang kesejahteraan Sosial, dalam menangani berbagai permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus menyentuh berbagai aspek baik yang ada di desa maupun diperkotaan.*

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-Isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal adalah *Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*

Isu strategis berkaitan dengan *Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* adalah hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dua tahun kedepan dikarenakan:

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusi (SDM) dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- b. Masih ditemukan bantuan social kepada masyarakat yang tidak tepat sasaran
- c. Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial belum optimal
- d. Masih minimnya Anggaran untuk Penanganan **Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)****

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan pada periode Dua tahunan. Tujuan juga merupakan penjabaran suatu pernyataan misi. Adapun sasaran adalah sesuatu yang menjadi target dalam kegiatan. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial, Kabupaten Tegal periode tahun 2025 – 2026 adalah :

*Tujuan Renstra adalah **Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan** dengan sasaran **Meningkatnya Cakupan Layanan Kinerja** melalui Indikator Sebagai berikut:*

1. Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Perseorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial
2. Peningkatan Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial
3. Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Peningkatan Cakupan Data Fakir Miskin

Tujuan dan Sasaran serta Indikator Dinas Sosial Kab. Tegal Tahun 2025 – 2026 , sebagai mana dalam tabel 4.1.1 berikut :

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2025 – 2026

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke | |
|-----|---|---|---|---|------|
| | | | | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Menurunkan Kedalaman dan keparahan Kemiskinan | Meningkatnya Cakupan Layanan Kinerja Sosial | Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Perseorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial | 100 | 100 |
| | | | Peningkatan Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial | 100 | 100 |
| | | | Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 100 | 100 |
| | | | Peningkatan Cakupan Data Fakir Miskin | 100 | 100 |

4.1.2.Cascading Kinerja Dinas Sosial

| MISI | TUJUAN RPJMD | SASARAN RPJMD | TUJUAN RENSTRA | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR PROGRAM | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR SEKSI | KEGIATAN (OUTPUT) |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|
| MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENGUATAN LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL DENGAN MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEHNOLOGI | MENEKAN LAJU KEMISKINAN | MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN | MENURUNKAN KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN | MENINGKATKAN CAKUPAN LAYANAN KINERJA SOSIAL | 1. Persentase Cakupan Pemberdayaan Perseorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana | 1. Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Perseorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial | 1. Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator :Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin Undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang | 1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan |
| | | | | | | | 2. Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Indikator :Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota | 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan |
| | | | | | | | | 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan |
| | | | | | | | | 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan |
| | | | | | | | | 4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) |
| | | | | | | | | 5. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial |
| | | | | | | | | 6. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kewenangan |
| | | | | | | | | 7. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan |
| 3. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator : Jumlah sarana prasarana TMP dan Kegiatan Kepahlawanan. | 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | 2. Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial anak , lanjut usia, Disabilitas dan Tuna Sosial | 2. Peningkatan Cakupan Rehabilitasi Sosial anak , lanjut usia Disabilitas dan Tuna Sosial | 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator :Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penyediaan Alat bantu 4. Penyediaan Layanan Data 5. Pemberian Layanan Rujukan 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, |
| | | | | | | | 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator :Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Dasar Kewenangan | 1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Alat bantu 3. Penyediaan Layanan Data 4. Pemberian Layanan 5. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi |
| | | | | | 3. Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 3. Cakupan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator :Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan | 1. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 2. Penjangkauan Anak-Anak |
| | | | | | | | 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator :Jumlah Fakir miskin yang mendapatkan | 1. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (DBHCHT) 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |
| | | | | | | | 3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator : Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Kebutuhan Dasar | 1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Tempat Penampungan pengungsi 3. Pelayanan Dukungan |
| | | | | | | | 4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana | 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga |
| | | | | | 4. Persentase Cakupan Penanganan Data Fakir Miskin | 4. Peningkatan Cakupan Data Penanganan Fakir Miskin | 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator :Jumlah Fakir miskin yang terdata Dan | 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam Tahun 2025- 2026 sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran ,Strategi, dan Kebijakan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | KEBIJAKAN |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MENURUNKAN LAJU KEMISKINAN | MENURUNKAN KEDALAMAN KEMISKINAN | 1 Peningkatan Cakupan PemberdayaanPerseorangan, Keluarga,Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial | 1 Peningkatan Jumlah pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) |
| | | | 2 Peningkatan Nilai nilai Kepahlawanan |
| | | | 3 Peningkatan Sumber Dana Sosisl |
| | | | 4 Pengadaan Bantuan untuk Veteran |
| | | 2 Peningkatan Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial | 1 Peningkatan Layanan Rehabilitasi (Rujukan) |
| | | | 2 Peningkatan Layanan Bantuan Alat Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas |
| | | | 3 Peningkatan Jumlah Bantuan untuk Lansia , anak terlantar dan Disabilitas |
| | | 3 Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1 Peningkatan Layanan perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | 2 Peningkatan layanan Fasilitasi Bantuan Ekonomi keluarga dan masyarakat |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------------------------------|---|--|
| | | | 3 Peningkatan Layanan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat |
| | | 4 Peningkatan Cakupan Data Fakir Miskin | 1 Peningkatan layanan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin |
| | | | 2 Peningkatan Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) |
| | MENURUNKAN KEPARAHAN KEMISKINAN | 1 Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Perseorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial | 1 Peningkatan Jumlah pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) |
| | | | 2 Peningkatan Nilai nilai Kepahlawanan melalui Kegiatan sarasehan |
| | | | 3 Peningkatan Sumber Dana Sosisl (CSR) |
| | | | 4 Pengadaan Bantuan untuk Veteran |
| | | 2 Peningkatan Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial | 1 Peningkatan Layanan Rehabilitasi (Rujukan) |
| | | | 2 Peningkatan Layanan Bantuan Alat Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas |
| | | | 3 Peningkatan Jumlah Bantuan untuk Lansia , anak terlantar dan Disabilitas |
| | | 3 Peningkatan Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1 Peningkatan Layanan perlindungan dan Jaminan Sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | 2 Peningkatan layanan Fasilitas Bantuan Ekonomi keluarga dan masyarakat |
| | | | 3 Peningkatan Layanan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat |
| | | 4 Peningkatan Cakupan Data Fakir Miskin | 1 Peningkatan layanan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin |
| | | | 2 Peningkatan Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) |

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Tahun 2025 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/Kegiatan, Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan sasaran Program (Outcome) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan | Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Realisasi) 2023 | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026) | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|------|--|---|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--|----------------|--|--------------|
| | | | | | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target | Rp. | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MENURUNKAN KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN | Meningkatnya Cakupan Layanan Kinerja Sosial | | <i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</i> | | | | 6.991.282.300 | | 5.612.209.000 | - | 12.603.491.300 | | |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 75.000.000 | 15 Dokumen, 1 Kegiatan, Monev | 75.000.000 | - | 150.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah | | 15 Dokumen, 1 Kegiatan, Monev | 75.000.000 | 15 Dokumen, 1 Kegiatan, Monev | 75.000.000 | | 150.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--|--|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 4.349.986.300 | | 4.770.913.000 | 0 | 9.120.899.300 | | |
| | | | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan | | 56 ASN | 4.209.267.700 | 58 ASN | 4.630.194.400 | | 8.839.462.100 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 7 ASN, 1 PTT | 140.718.600 | 7 ASN, 1 PTT | 140.718.600 | | 281.437.200 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 377.500.000 | | 377.500.000 | | 755.000.000 | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang dimiliki | | 10 Jenis | 7.500.000 | 10 Jenis | 7.500.000 | | 15.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan | | 70 Jenis | 60.000.000 | 70 Jenis | 60.000.000 | | 120.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|---|--|---|---|----------------------|------------------|-------------|----|----------------------|--------------|--------------|
| | | | <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> | Jumlah Paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan | | 50 Jenis | 20.000.000 | 50 Jenis | 20.000.000 | | 40.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> | Jumlah paket bahan Logistik Kantor yang disediakan. | | 65 Orang | 80.000.000 | 65 Orang | 80.000.000 | | 160.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan</i> | Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | 10 Jenis | 10.000.000 | 10 Jenis | 10.000.000 | | 20.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan | | 2 Jenis 12 Bulan | 25.000.000 | 2 Jenis 12 Bulan | 25.000.000 | | 50.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan dan konsultasi SKPD | | 1 Tahun | 175.000.000 | 1 Tahun | 175.000.000 | | 350.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 1.080.000.000 | - | - | - | 1.080.000.000 | | |
| | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan | | 1 unit kendaraan dinas eselon 3.a dan 1 unit ambulans | 800.000.000 | | | | 800.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Pengadaan mebel</i> | | | 2 unit meja kursi tamu dan ruang tunggu layanan | 80.000.000 | | | | 80.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | | Pengadaan 3 Smart TV, 2 Lemari Es, 1 dispenser, 3 AC | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|--|--|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| | | | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i> | | | | | | | - | | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 183.796.000 | | 183.796.000 | | 367.592.000 |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik yang disediakan. | | 4 Lokasi,1 Tahun | 150.000.000 | 4 Lokasi,1 Tahun | 150.000.000 | 300.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum</i> | Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan. | | - | 33.796.000 | - | 33.796.000 | 67.592.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Belanja Iuran Kesehatan bagi Non ASN</i> | | | - | 31.624.000 | - | 31.624.000 | 63.248.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Belanja BPJS THL</i> | | | | 30.545.000 | | 30.545.000 | 61.090.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Belanja BPJS PTT</i> | | | | 1.079.000 | | 1.079.000 | 2.158.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi non ASN</i> | | | - | 2.172.000 | - | 2.172.000 | 4.344.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | <i>Belanja BPJS Ketenagakeraan bagi PTT</i> | | | | 2.172.000 | | 2.172.000 | 4.344.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 925.000.000 | | 205.000.000 | 1.130.000.000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|---|---|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | | 10 Ac, 10 Laptop, 7 Printer, | 25.000.000 | 10 Ac, 10 Laptop, 7 Printer, | 25.000.000 | | 50.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 2 Gedung 3 THL | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 650.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi | | 2 Gedung 3 THL | 300.000.000 | 2 Gedung 3 THL | 350.000.000 | | 650.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Penataan Organisasi | | | | 50.000.000 | | | | 50.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | 30 ASN | 70.000.000 | 30 ASN | 80.000.000 | | 150.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL | | | | 11.604.935.600 | - | 13.278.542.350 | | 24.883.477.950 | | |
| Presentase PSKS perseorangan keluarga dan kelembagaan yang dibina dan diberdayakan | Meningkatkan PSKS Perseorangan keluarga dan kelembagaan yang dibina dan diberdayakan | PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL | | | | 1.446.200.000 | | 1.556.010.000 | - | 3.002.210.000 | | |
| | | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 12.000.000 | 30 lembaga/ organisasi | 14.000.000 | | 26.000.000 | | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | Jumlah lembaga/organisasi yang mengajukan izin untuk pengumpulan uang atau barang | | 30 lembaga/organisasi | 12.000.000 | 30 lembaga/organisasi | 14.000.000 | | 26.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1.434.200.000 | | 1.542.010.000 | | 2.976.210.000 | | |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah TKSK mendapatkan peningkatan kapasitas | | | 556.100.000 | | 566.100.000 | | 1.122.200.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Bimtek TKSK | | 2 kegiatan | 20.000.000 | 2 kegiatan | 25.000.000 | | 45.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Bulan Bhakti TKS | | 1 kegiatan | 15.000.000 | 1 kegiatan | 20.000.000 | | 35.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Honor TKSK | | 18 tsk | 514.800.000 | 18 tsk | 514.800.000 | | 1.029.600.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | seragam TKSK | | 18 tsk | 6.300.000 | Tas Kerja TKSK | 6.300.000 | | 12.600.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota IPSM yang meningkat kapasitasnya | | | 220.000.000 | | 242.000.000 | | 462.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Bimtek IPSM | | 2 kegiatan | 20.000.000 | 2 kegiatan | 22.000.000 | | 42.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Sarasehan IPSM | | 1 kegiatan | 50.000.000 | 1 kegiatan | 55.000.000 | | 105.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|--|---|------------|-------------------|------------|-------------------|----|-------------|--------------|--------------|
| | | | Rakoor IPSM | | 2 kegiatan | 10.000.000 | | 11.000.000 | | 21.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Seragam IPSM | | 35 orang | 12.250.000 | | | | 12.250.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pembentukan PSM tingkat desa | | 287 desa | 60.000.000 | | | | 60.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pembinaan PSM tingkat Desa | | | | 3 kegiatan | 45.000.000 | | 45.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Peningkatan Kemampuan Potensi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. | Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan kapasitas PSKS kabupaten/Kota | | | 331.500.000 | - | 374.650.000 | - | 706.150.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Dinas Sosial Dijadikan dijadikan sebagai Sentra Kreatifitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) | | | Rp 331.500.000,00 | | Rp 374.650.000,00 | | 706.150.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Porseni tingkat jawa tengah | | 1 kegiatan | Rp 104.500.000,00 | 1 kegiatan | Rp 114.950.000,00 | | 219.450.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Bulan bakti karanga taruna | | 1 kegiatan | Rp 20.000.000,00 | 1 kegiatan | Rp 22.000.000,00 | | 42.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Peksos Goes to School | | 4 kegiatan | Rp 32.000.000,00 | 4 kegiatan | Rp 35.200.000,00 | | 67.200.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Hari Anak Nasional | | 1 kegiatan | Rp 25.000.000,00 | 1 kegiatan | Rp 27.500.000,00 | | 52.500.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Sentra UMKM PSKS | | 10 PSKS | Rp 100.000.000,00 | 12 PSKS | Rp 120.000.000,00 | | 220.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|---|---|---|----------------|------------------|----------------|-------------------|----|-------------|--------------|--------------|
| | | | | kegiatan hari kesetiakawanan sosial (porseni PSKS) | | 1 kegiatan | Rp 50.000.000,00 | 1 kegiatan | Rp 55.000.000,00 | | 105.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota | | | 130.000.000 | | 143.000.000 | | 273.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Kapacity Building untuk fasilitator SLRT | | 1 kegiatan | 50.000.000 | 1 kegiatan | 55.000.000 | | 105.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Rakoor PSKS | | 2 kegiatan | 10.000.000 | 2 kegiatan | 11.000.000 | | 21.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Rakoor LKSA | | 2 kegiatan | 10.000.000 | 2 kegiatan | 11.000.000 | | 21.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Trengginas Award | | 1 Kegiatan | 50.000.000 | 1 Kegiatan | 55.000.000 | | 105.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Rakoor TJSLP | | 2 kegiatan | 10.000.000 | 2 kegiatan | 11.000.000 | | 21.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga kewenangan kabupaten/Kota | | | 196.600.000 | 1 kegiatan | Rp 216.260.000,00 | | 412.860.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | honor THL | | 1 THL | 28.600.000 | 1 THL | 28.600.000 | | 57.200.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | honor Fasilitator | | 30 fasilitator | 108.000.000 | 30 fasilitator | 108.000.000 | | 216.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----|--------------------|--------------|--------------|
| | | | Kapacity building PSKS | | 1 kegiatan | 35.000.000 | 1 kegiatan | 38.500.000 | | 73.500.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Bimtek Pengasuhan anak untuk pengurus LKSA | | 1 kegiatan | 25.000.000 | 1 kegiatan | 27.500.000 | | 52.500.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | | | 275.000.000 | - | 302.500.000 | - | 577.500.000 | | |
| | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | 275.000.000 | - | 302.500.000 | | 577.500.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman makam pahlawan kewenangan Kabupaten/kota | | | 275.000.000 | | 302.500.000 | | 577.500.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pemeliharaan TMP | | 1 pemeliharaan | 60.000.000 | 1 pemeliharaan | 66.000.000 | | 126.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Sarana dan Prasarana TMP | | 1 sarana dan prasarana | 86.000.000 | 1 sarana dan prasarana | 94.600.000 | | 180.600.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Honor THL 1 Orang | | 1 THL | 28.600.000 | 1 THL | 31.460.000 | | 60.060.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Upacara Hari Pahlawan | | 1 kegiatan | 60.000.000 | 1 kegiatan | 66.000.000 | | 126.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Sarasehan | | 1 kegiatan | 40.000.000 | 1 kegiatan | 44.000.000 | | 84.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Foto Copy | | 1 kegiatan | 400.000 | 1 kegiatan | 440.000 | | 840.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|---|---|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----|----------------|--------------|--------------|
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | 7.081.235.600 | | 8.274.282.350 | - | 15.355.517.950 | | |
| | | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | 6.758.735.600 | | 7.944.832.350 | | 14.703.567.950 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Penyediaan Permakanaan | Jumlah PPKS yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 4.827.790.000 | | 5.310.569.000 | | 10.138.359.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Jadup Lansia | | 621 orang x 12 bulan | | 683 orang x 12 bulan | | | | | |
| | | | | Bantuan Permakanaan untuk Anak Terlantar (SPM) | | 33 orang | | 36 orang | | | | | |
| | | | | Bantuan Permakanaan untuk Lansia (SPM) | | 44 orang | | 48 orang | | | | | |
| | | | | Bantuan Permakanaan untuk Penyandang Disabilitas (SPM) | | 33 orang | | 36 orang | | | | | |
| | | | | Permakanaan untuk Anak Terlantar/JPS Kelompok Rentan/Beras Putih | | 708 orang | | 778 orang | | | | | |
| | | | | Permakanaan bagi Disabilitas Terlantar /JPS Kelompok Rentan/Beras Putih | | 78 orang | | 86 orang | | | | | |
| | | | | Permakanaan SOSH PMKS di Rumah Singgah | | 70 orang | | 77 orang | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|---------------------------|---|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----|---------------|--------------|--------------|
| | | | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/Kota | | | 99.000.000 | | 108.900.000 | | 207.900.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Tersedianya sandang untuk Anak Terlantar (SPM) | | 33 orang | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya sandang untuk Disabilitas Terlantar (SPM) | | 44 orang | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya sandang untuk Lansia Terlantar (SPM) | | 33 orang | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya sandang untuk PPKS di Rumah Singgah | | 70 orang | | | | | | | |
| | | | | Tersedianya perlengkapan mandi untuk PPKS di Rumah Singgah | | 70 orang | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai Kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota | | 120 orang | 800.000.000 | 120 orang | 842.490.000 | | 1.642.490.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Kursi Roda | | 100 orang | | 100 orang | | | | | |
| | | | | Alat Bantu Dengar | | 20 orang | | 20 orang | | | | | |
| | | | Pemberian Layanan Rujukan | SLAMET LAKA PEDOTE (Slawi Ayu Mbetahi Laka Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) | | | 117.248.500 | | 128.973.350 | | 246.221.850 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Rapat Koordinasi Lintas Sektoral untuk penanganan PGOT | | 30 orang x 6 kegiatan | 17.550.000 | 30 orang x 6 kegiatan | 19.305.000 | | 36.855.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|---|---|----------|-------------|-----------|-------------|----|---------------|--------------|--------------|
| | | | Jumlah Orang/PPKS mendapatkan layanan rujukan Ke wenangan Kabupaten/Kota | | 95 orang | 99.698.500 | 105 orang | 109.668.350 | | 209.366.850 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | SLAMET LAKA PEDOTE (Slawi Ayu Mbetahi Laka Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar) | | | 76.297.100 | | 634.000.000 | | 710.297.100 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Jumlah Orang/PPKS yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | 33 orang | 76.297.100 | 36 orang | 84.000.000 | | 160.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Orang/PPKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 500.000.000 | | 550.000.000 | | 1.050.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberian Modal Usaha Bagi PPKS | | | | | | | | | |
| | | | Kelas Bahasa Isyarat | | | | | | | | | |
| | | | Kelas Musik | | | | | | | | | |
| | | | Kelas DTLS | | | | | | | | | |
| | | | Kelas GerkatIn | | | | | | | | | |
| | | | Kelas Teater | | | | | | | | | |
| | | | Kelas Pelatihan Tata Boga | | | | | | | | | |
| | | | Kelas Pelatihan batik ciprat | | | | | | | | | |
| | | | Kelas Pelatihan Bahasa Isyarat (Bisindo) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|--------------|--------------|
| | | | | Peringatan Hari Disabilitas Internasional | | | | | | | | |
| | | Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang/PPKS yang mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 38.400.000 | | 39.900.000 | | 78.300.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pelaksanaan ruang belajar bagi penyandang disabilitas cerebral palsy | | 12 bulan | 23.400.000 | 12 bulan | 23.400.000 | | 46.800.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Akses kesehatan bagi PPKS di Rumah Singgah | | 12 bulan | 15.000.000 | 12 bulan | 16.500.000 | | 31.500.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Sub Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | 300.000.000 | | 330.000.000 | | 630.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Pendataan PPKS anak terlantar, lanjut usia terlantar dan disabilitas | | 12 bulan | | 12 bulan | | | | | |
| | | | Sosialisasi Program Rehabilitasi Sosial | | 18 kegiatan | | 18 kegiatan | | | | | |
| | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | 322.500.000 | - | 329.450.000 | | 651.950.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | | | | 322.500.000 | | 329.450.000 | | 651.950.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Honor THL 7 orang | | | 12 bulan | 200.200.000 | 12 bulan | 200.200.000 | | 400.400.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | Honor THL (Pekerja Sosial Rumah Singgah) 2 orang | | | 12 bulan | 52.800.000 | 12 bulan | 52.800.000 | | 105.600.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
|---|---|---|--|--|---|------------------------|---|----------------------|----------|----------------------|----|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Rapat Pembentukan Peraturan, SOP Rumah Layanan Sosial/Rumah Singgah | | | 20 orang x 10 kegiatan | | 9.500.000 | | 10.450.000 | | 19.950.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/Pemprov /Kemensos | | | 12 bulan | | 50.000.000 | 12 bulan | 55.000.000 | | 105.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Perjalanan dinas dalam rangka studi banding Rumah Pelayanan Sosial di Kabupaten/Kota Lainnya | | | | | 10.000.000 | | 11.000.000 | | 21.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PPKS Fakir Miskin dan Anak Terlantar yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial | | | | 2.207.500.000 | - | 2.395.750.000 | - | 4.603.250.000 | | |
| | | | Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | 157.500.000 | | 170.750.000 | | 328.250.000 | | |
| | | | Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar | | | | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | | | |
| | | | | Rakor | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | Pelatihan anak terlantar | | | | 1 | | | | | | |
| | | | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Jumlah anak anak terlantar yang dijangkau kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 82.500.000 | 100 | 90.750.000 | | 173.250.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|--|---|---------|---|----------------------|---|---------------|----------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Anak anak terlantar yang dijangkau | | 40 | - | 50 | - | | - | | |
| | | | Rakor | | 1 | - | 1 | - | | - | | |
| | | | Pendampingan Hukum | | 12 | - | 12 | - | | - | | |
| | | | Rakor | | | - | | - | | - | | |
| | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 2.050.000.000 | | | 2.225.000.000 | | 4.275.000.000 |
| | | | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin kewenangan Kabupaten/Kota yang didata | 100 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 2.500.000.000 | Dinas Sosial Dinas Sosial |
| | | | | | | - | | - | | - | | |
| | | | Data Verval | | 677.696 | - | 685.237 | - | | - | | |
| | | | Bimtek Tk Kecamatan | | 1 | - | 1 | - | | - | | |
| | | | Honor TSKS 18 Orang | | 12 | - | 12 | - | | - | | |
| | | | Petugas Pendataan PMKS | | 287 | - | 287 | - | | - | | |
| | | | Rakor Tingkat Kabupaten | | 1 | - | 1 | - | | - | | |
| | | | Rakor Tingkat Kecamatan | | | - | | - | | - | | |
| | | | Rakor Tingkat Desa | | | - | | - | | - | | |
| | | | Honor THL 3 Orang (Data Tk.Kabupaten) | | 12 | - | 12 | - | | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|--|---|---|-----|-------------|-----|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | Honor Tim Humas | | 12 | - | 12 | - | - | | |
| | | | | Rapat Penetapan DTKS Percontohan | | | - | | - | - | | |
| | | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | 100 | 500.000.000 | 100 | 525.000.000 | 1.025.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Bimtek FDS | | 1 | - | 1 | - | - | | |
| | | | | Kehabisan Bekal | | 50 | - | 75 | - | - | | |
| | | | | Living Cost | | 400 | - | 500 | - | - | | |
| | | | | Honor THL 1 Orang | | 12 | - | 12 | - | - | | |
| | | | | Rakor BPNT | | | - | | - | - | | |
| | | | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (DBHCHT) | Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota | | 100 | 100.000.000 | 100 | 125.000.000 | 225.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | - | | - | - | | |
| | | | | Rakor PKH Mandiri | | 2 | - | 2 | - | - | | |
| | | | | Sosialisasi PKH Mandiri | | 1 | - | 1 | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|--|--|---|-------|--------------------|-------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Honor pendamping PKH Mandiri | | 44 | - | 44 | - | - | | | |
| | | | | Honor petugas verifikasi data | | 5 | - | 5 | - | - | | | |
| | | | fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (DBHCHT) | Jumlah Orang yang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 250.000.000 | | 275.000.000 | 525.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | |
| | | | | Rakor | | | | | | | | | |
| | | | | Bimtek | | | | | | | | | |
| | | | | Honor THL | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah / Kabupaten | | | 595.000.000 | - | 750.000.000 | 1.345.000.000 | | | |
| | | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | 350.000.000 | - | 450.000.000 | - | 800.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Penyediaan Makanan | Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota | | | 150.000.000 | | 175.000.000 | 325.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial | |
| | | | | Makanan siap Saji | | 2.400 | | 2.400 | - | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|---|---|-----|-------------|-----|-------------|----|-------------|--------------|--------------|
| | | | Paket Aktifitas lapangan | | 100 | | 100 | - | | - | | |
| | | | Paket Sembako | | 600 | | 800 | - | | - | | |
| | | | Honor THL 1 Orang | | 12 | | 12 | - | | - | | |
| | | | Honor Pengirim barang ke Lokasi 28 Orang | | | | | - | | - | | |
| | | | Belanja Natura Beras (Kg) | | | | | - | | - | | |
| | | | Belanja Natura Mie Instan (Buah) | | | | | - | | - | | |
| | | | Belanja Natura Minyak Goreng(Liter) | | | | | - | | - | | |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan pengungsi | Jumlah tempat pengungsian Kewenangan kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | 150.000.000 | | 250.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Kasur | | 25 | | 40 | - | | - | | |
| | | | Matras | | 50 | | 80 | - | | - | | |
| | | | Peralatan Dapur Keluarga | | 23 | | 50 | - | | - | | |
| | | | Perlengkapan Keluarga | | 23 | | 50 | - | | - | | |
| | | | Tenda Keluarga | | 1 | | 3 | - | | - | | |
| | | Pelayanan Dukungan Psikososial | jumlah Korban bencana yang mendapatkan Layanan dukungan Psikososial kewenangan Kabupaten/Kota | | | 100.000.000 | | 125.000.000 | | 225.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM | | 1 | | 1 | - | | - | | |
| | | | Rakor | | 1 | | 1 | - | | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|--|-----|-------------|-----|-------------|----|-------------|--------------|--------------|
| | | | Penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana | | | 245.000.000 | | 300.000.000 | - | 545.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Jumlah Kampung yang melaksanakan koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan kampung Siaga Bencana kewenangan kabupaten /Kota | 100 | 120.000.000 | 100 | 150.000.000 | | 270.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Bimtek KSB | 1 | | 2 | - | | - | | |
| | | | | Sosialisasi Pembentukan KSB | 1 | | 2 | - | | - | | |
| | | | | Honor THL | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan kabupaten /Kota | | 125.000.000 | | 150.000.000 | | 275.000.000 | Dinas Sosial | Dinas Sosial |
| | | | | Rakor Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana | 2 | | 3 | | | - | | |
| | | | | Sosialisasi TMS | 2 | | 3 | | | - | | |
| | | | | Bimtek Tagana | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Tegal
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD |
|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--|
| | | Tahun 2023 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| | Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan | | | | |
| 1 | Persentase PSKS perseorangan, Keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan. | 83,15 | | | |
| 2 | Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti. | 81,15 | | | |
| 3 | Persentase PPKS ,Fakir miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. | 100 | | | |
| 4 | Percentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten. | 100 | | | |
| 5 | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 90,25 | | | |
| 6 | Percentase Cakupan fasilitasi Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan/perdagangan orang | 100 | | | |
| | Menurunkan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan | | | | |
| 1 | Persentase Pemberdayaan Perseorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana Sosial | | | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial | | | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial | | | 100 | 100 |
| 4 | Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin | | | 100 | 100 |
| | | | | | |

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2026 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 2 (dua) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Dinas Sosial yang mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal.

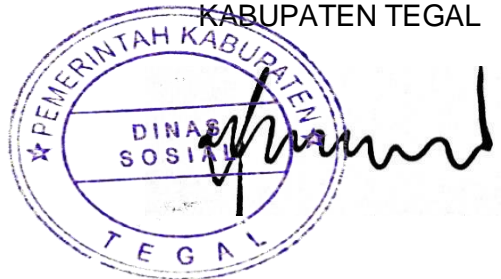
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan- Undangan. Penyusunan Program – program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program- program atau rencana kerja 2 (dua) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Kabupaten Tegal termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tegal

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan

Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Slawi, 30 Nopember 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL



IWAN KURNIAWAN . AP.MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197604291995011001

